



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman perubahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 karena adanya beberapa perubahan rencana kerja yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga diharapkan program dan kegiatan-kegiatan di Dinas Perhubungan dapat tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan menjadi acuan seluruh Bidang dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, Agustus 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



SALIM, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TW II TAHUN 2023	13
2.1 Evaluasi Terhadap hasil Renja Dinas Perhubungan Sampai Triwulan II	13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN	23
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan ...	23
3.2. Perubahan Belanja Dinas Perhubungan Tahun 2023	24
3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	26
BAB IV PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

	Hal
II.1 Target dan Realisasi Anggaran per Program s.d TW II Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam	14
II.2. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam	15
III.3. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan tahun 2023 Dinas perhubungan Kota Batam	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, dan Perubahan Renja, pada Perubahan Renja masih ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui yaitu Rancangan Perubahan Renja, Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Perubahan Renja.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang memuat analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya Perubahan APBD pada tahun berjalan. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2023; dan/atau
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Dengan kata lain renja perubahan perangkat daerah 2023 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023 dimulai dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Renja Perubahan tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada Renja Perubahan perangkat daerah terkait.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4739) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - 11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 23) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
 - 24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran

- Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
- 38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
- 39) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 40) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
- 41) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
- 42) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 43) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam

- Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
- 44) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862);
- 45) Peraturan Walikota Batam Nomor 224 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1092);
- 46) Peraturan Walikota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 11209);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023, agar sejalan dengan target-target pembangunan

yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Perhubungan sampai Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan
- 3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023
- 3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan Triwulan II (Januari – Juni) Tahun 2023 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun 2023 dan juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan.

Analisis capaian kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2023 ini sudah mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026 dimana indikator program dan target renstra telah mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah periode 2021-2026 dan tentunya telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam sesuai Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2016.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kota Batam masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Batam menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat diserap sesuai yang direncanakan, sehingga sampai dengan triwulan II tahun 2023 dari pagu anggaran sebesar Rp.50.561.241.546,- baru terealisasi sebesar Rp.19.366.483.079,00 atau sekitar 38% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Target dan Realisasi Anggaran per Program s.d TW II Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kota Batam

PROGRAM		PAGU 2023 Rp	RENCANA PENYERAPAN S.D TW II 2023 Rp	REALISASI S.D TW II 2023 Rp	% PENYERAPAN ANGGARAN	% TARGET KEUANGAN
1	Pogram Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.823.032.506,00	13.929.689.097,00	10.885.185.899,00	39%	78%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.198.762.090,00	10.377.983.804,00	8.238.686.720,00	43%	79%
3	Program Pengelolaan Pelayaran	3.539.446.950,00	697.396.959,00	242.610.460,00	7%	35%
		50.561.241.546,00	25.005.069.860,00	19.366.483.079,00	38%	77%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam sampai Triwulan II tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada tabel II.1 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hampir semua program dan kegiatan belum menunjukkan hasil sebagaimana target yang ditetapkan, mengingat kegiatan pada triwulan II tahun 2023 ini masih berlangsung, bahkan beberapa pekerjaan masih dalam tahap pelaksanaan pengadaan.
2. Banyak usulan-usulan masyarakat hasil dari Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) yang tidak dapat terakomodir yang disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan dan pengendalian belanja yang tentu saja berakibat terhadap target RPJMD yang tidak dapat tercapai sebagaimana yang telah diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kota Batam dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel II.2 berikut :

Tabel II.2
Evaluasi Hasil Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			491.405.204.980			82.872.818.679			64.814.047.110		50.561.241.546		7.648.909.594		11.717.116.196	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	%	100	228.500.882.737	%	53%	33.341.752.230	%	71	29.460.332.150	71	18.090.257.390	53	3.099.187.359	53	4.551.473.896
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Unit	5211		Unit	2.746		Unit	3698		3698	2.746		2.746		
	2.15.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	%	100	951.527.900,00	%			%	0	0,00	0	0	0%	0	0	0
	2.15.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	951.527.900,00				Dokumen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	%	100	21.301.820.126,00	%	46	2.118.341.078,00	%	100	4.948.065.500,00	100	1.662.989.500		0	28,41	121.655.000
	2.15.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana jalan di jalan kabupten/kota yang terbangun	Unit	38	6.685.928.860,00	Unit	2	247.189.266,00	Unit	4	891.824.900,00	1	561.625.100	0	0	0	43.070.000
	2.15.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan kabupten/kota yang tersedia	Unit		11.590.049.620,00	Unit	255	1.042.893.995,00	Unit	214	3.306.499.600,00	177	546.715.400	0	0	0	31.305.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023			
				5			6			7			8		9			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
												Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
	2.15.02.2.02.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1.328.330.246,00	Unit	15	278.556.417,00	Unit	16	396.070.000,00	15	253.250.000	0	0	0	17.610.000
	2.15.02.2.02.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1.697.511.400,00	Unit	195	549.701.400,00	Unit	125	353.671.000,00	67	301.399.000	0	0	0	29.670.000
	2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	%	100	40.352.733.534,00	%	56	9.643.108.718,00	%	75	7.606.382.300,00	63	2.331.166.900	54	0	54	552.414.550
	2.15.02.2.06.02	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit		40.352.733.534,00	Unit	39	9.643.108.718,00	Unit	37	7.606.382.300,00	37	2.331.166.900	37	0	37	552.414.550
			Jumlah Jukir yang Melaksanakan Transaksi Non Tunai	Orang	400	53.861.917.100,00	Orang	0	2.974.029.140,00	Orang	0	2.164.093.100,00	100	1.270.091.000	0	218.785.080		355.985.080
	2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang yang dikelola	%	100	53.861.917.100,00	%	70	2.974.029.140,00	%	84	2.164.093.100,00	88	1.270.091.000	70	218.785.080	70%	355.985.080
	2.15.02.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	720	53.861.917.100,00	Laporan	596	2.974.029.140,00	Laporan	628	2.164.093.100,00	628	1.270.091.000	598	218.785.080	598	355.985.080

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	%	80	16.187.518.090,00	%	62	2.034.666.700,00	%	73	957.239.000,00	75	804.339.000	17	250.000.000	32	21.800.000
	2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	%	73	14.492.849.000,00	%	100	1.697.046.700,00	%	61	693.239.000,00	64	685.739.000	0	250.000.000	33,87	0
	2.15.02.2.05. 01	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Bermotor	Unit	84	10.343.382.000,00	Unit	5	326.616.500,00	Unit	11	51.739.000,00	11	51.739.000	0	0	0	0
	2.15.02.2.05. 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	set	72000	1.800.000.000,00	set	26.000	650.000.000,00	Dokumen	10.000	257.500.000,00	10.000	250.000.000	10.000	250.000.000	0	0
	2.15.02.2.05. 07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	4	2.349.467.000,00	Unit	2	720.430.200,00	Unit	3	384.000.000,00	3	384.000.000	0	0	0	0
	2.15.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	%	100	1.694.669.090,00	%	100	337.620.000,00	%	100	264.000.000,00	100	118.600.000	20	0	30	21.800.000
	2.15.02.2.08. 04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	406	1.694.669.090,00	Laporan	80	337.620.000,00	Laporan	60	264.000.000,00	30	118.600.000	6	0	10	21.800.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
			Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	%	63	95.845.365.987,00	%	38	16.571.606.594,00	Persentase	27	13.784.552.250,00	33	12.021.670.990	5	2.630.402.279	11	3.499.619.266
	2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	%	100	95.845.365.987,00	%	80	16.571.606.594,00	%	90	13.784.552.250,00	90	12.021.670.990	80	2.630.402.279	80	3.499.619.266
	2.15.02.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia (koridor)	Unit	45	95.845.365.987,00	Unit	56	16.571.606.594,00	Koridor	50	13.784.552.250,00	50	12.021.670.990	42	2.630.402.279	42	3.499.619.266
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	%	49	84.431.729.880,39	%	49	7.269.743.132,00	%	49	7.859.623.550,00	49	5.209.576.750	8	458.900.886	17	414.805.039
	2.15.03.2.06	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	%	100	47.100.733.814,00	%	66,67	1.655.779.300,00	%	67	1.706.129.800,00	67	1.670.129.800	67	358.279.386	67	272.816.079
	2.15.03.2.06.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Laporan	60	47.100.733.814,00	Laporan	4	3.119.680.300,00	Laporan	2	1.706.129.800,00	2	1.670.129.800	2	358.279.386	2	272.816.079

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	2.15.03.2.12	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	%	100	37.330.996.066,39	%	80	5.613.963.832,00	%	100	6.153.493.750,00	100	3.539.446.950		100.621.500	30	141.988.960
	2.15.03.2.12.02	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun	Unit	11	33.628.994.550,17	Unit	2	4.453.615.934,00	Unit	2	4.677.944.750,00	1	1.387.304.750	0	86.886.000	0	0
	2.15.03.2.12.03	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara	unit	34	3.702.001.516,23	Unit	5	1.160.347.898,00	Unit	6	1.475.549.000,00	8	2.152.142.200	0	13.735.500	0	141.988.960
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	178.472.592.363,00	%	100	42.261.323.317,00	%	100	27.494.091.410,00	100	27.261.407.406		4.090.821.349	68	6.750.837.261
	2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	80.413.492.746,00	%	100	22.342.685.001,00	%	100	13.409.387.510,00	100	12.987.864.086		2.106.813.990	50	3.838.113.135
	2.15.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan			79.591.383.746,00	Orang	73	22.039.645.001,00	Orang	73	13.243.067.510,00	73	12.821.544.086	73	2.080.343.990	73	3.800.908.135
	2.15.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			822.109.000,00	Dokumen	42	303.040.000,00	Kegiatan	32	166.320.000,00	32	166.320.000	8	26.470.000	32	37.205.000

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	280.320.000,00	%	100	0,00	%	100	265.224.000,00	9	68.712.000	0	0	0	0
	2.15.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		320	280.320.000,00	stel	0	0,00	Paket	172	127.036.000,00	0	0	0	0	0	0
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							Orang	10	138.188.000,00	9	68.712.000	0	0	0	0
	2.15.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.161.420.424,00	%	100	622.089.293,00	%	100	259.861.300,00	100	175.738.300		0	38,98	85.670.389
	2.15.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	3	324.395.500,00	Paket	3	192.358.500,00	Paket	1	8.366.000,00	1	8.366.000	0	0	1	8.362.500
	2.15.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	5	535.246.924,00	Paket	2	167.462.000,00	Paket	5	83.143.500,00	5	83.143.500	0	0	1	67.836.500
	2.15.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	1	219.799.000,00	Paket	1	174.630.000,00	Paket	2	19.100.000,00	1	8.250.000	0	0	0	0
	2.15.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	1	132.214.700,00	Paket	1	47.933.400,00	Paket	1	24.486.800,00	1	24.486.800	0	0	0	0
	2.15.01.2.06.09	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	192	949.764.300,00	Laporan	23	39.705.393,00	Laporan	38	124.765.000,00	30	51.492.000	3	0	6	9.471.389

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	%	100	1.626.143.012,00	%	100	435.725.328,00	%	100	1.198.126.400,00	100	291.454.500		0	95	270.740.000
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							Unit	2	737.480.000,00						
	2.15.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Jenis	5	623.520.000,00	Unit	5	84.200.000,00	Unit	22	103.430.000,00	0	0	0	0	0	0
	2.15.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jenis	5	890.623.012,00	Unit	32	259.760.000,00	Unit	48	357.216.400,00	38	291.454.500	0	0	33	270.740.000
	2.15.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Unit	-	112.000.000,00	Unit		91.765.328,00	Unit	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	100	16.551.147.100,00	%	100	4.943.305.759,00	%	100	2.717.737.400,00	100	2.716.293.080		624.915.952	52,5	751.697.347
	2.15.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jenis	4	5.419.451.500,00	Laporan	4	1.421.916.198,00	jenis	4	805.695.000,00	4	805.695.000	4	183.409.822	4	171.451.217
	2.15.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	72	11.131.695.600,00	Laporan	13	3.521.389.561,00	Orang	12	1.912.042.400,00	13	1.910.598.080	3	441.506.130	4	580.246.130

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Kinerja RenStra Tahun 2026 (Akhir Periode RenStra)			Realisasi Capaian Kinerja RenJa s.d. 2022			Target kinerja dan Anggaran RenJa Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023			Target kinerja dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan Tahun 2023			
				Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	TW1		TW2	
															Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
	2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	%	100	5.256.762.464,00	%	100	1.402.866.445,00	%	100	685.560.000,00	100	685.560.000		65.447.600	38,02	93.518.900
	2.15.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		3.928.807.000,00	Unit	99	858.528.900,00	Unit	99	631.630.000,00	99	631.630.000	10	64.697.600	48	92.768.900
	2.15.01.2.09.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit		211.200.000,00	Unit	0	0,00	Unit	6	51.530.000,00	7	51.530.000	0	0	0	0
	2.15.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	8	1.116.755.464,00	Unit	1	544.337.545,00	Unit	1	2.400.000,00	1	2.400.000	1	750.000	1	750.000
	2.15.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	%	100	72.183.306.617,00	%	90	12.514.651.491,00	%	90	8.958.194.800,00	90	10.335.785.440		1.293.643.807	55,05	1.711.097.490
	2.15.01.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	72.183.306.617,00	Unit Kerja	1	12.514.651.491,00	Unit kerja	1	8.958.194.800,00	1	10.335.785.440	1	1.293.643.807	1	1.711.097.490

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERHUBUNGAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 Dinas Perhubungan pada RPJMD 2021-2026 mengemban misi ke 2 yaitu ‘mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan’ dan misi ke 4 yaitu ‘meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi perhubungan di wilayah hinterland’.

Berdasarkan kedua misi tersebut ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yaitu :

MISI WALIKOTA	TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN	SASARAN DINAS PERHUBUNGAN
Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan transportasi perhubungan di wilayah hinterland	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland

Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan indikator tujuan dan indikator sasaran, yaitu keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dinas Perhubungan telah menetapkan indikator tujuan dan sasaran untuk 5

(lima) tahun kedepan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas perhubungan untuk melaksanakan setiap tahunnya.

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan lagi dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Sehingga target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan otomatis mendukung tercapainya indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. PERUBAHAN BELANJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang dirasionalisasi namun ada juga yang mengalami penambahan. Total pagu dana dalam renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam menjadi Rp.57.041.683.246,00 atau turun sebesar 12% dari pagu dana Rencana Kerja Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 64.814.047.110,00 namun dibandingkan dengan pagu APBD Murni Tahun 2023 naik sebesar 13% dari pagu dana sebesar Rp.50.561.241.546,00.

Pada Perubahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran atau rasionalisasi (dibandingkan dengan pagu APBD 2023) sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dirasionalisasikan karena hingga bulan Juli 2023 Dinas Perhubungan tidak menerima undangan pendidikan dan pelatihan untuk pegawai baik dari kementerian Perhubungan maupun dari instansi lain.
2. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, mengalami penurunan pagu dari Rp10.335.785.440 menjadi

Rp7.478.207.136,00 dikarenakan UPT Trans Batam tidak dapat mencapai target pendapatan sebagaimana yang ditetapkan pada awal tahun anggaran, sehingga beban belanja yang semula dibebankan pada BLUD berpindah menjadi beban APBD Perubahan 2023.

3. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, membutuhkan penambahan dana sebesar Rp5.537.942.900,00 untuk Pembangunan Lampu Traffic Light pada 2 (dua) simpang yaitu Simpang 3 KDA Luar dan Simpang 4 Kepri Mall dan pemasangan link komunikasi dari Simpang Kepri Mall menuju simpang Airport dan Simpang Batu Besar.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, mengalami penambahan pagu dana sebesar Rp3.613.650.044,00 dikarenakan adanya penambahan Gaji dan asuransi untuk Pegawai Kontrak sebanyak 2 (dua) bulan yang semula dianggarkan hanya sampai bulan November 2023 sehingga butuh penambahan mengingat aturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum diberlakukan. Selain itu adanya penambahan BBM untuk Bus Trans Batam dan Bus Sekolah.
5. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal, mengalami rasionalisasi pada 2 (dua) lokasi Pemeliharaan Dermaga yaitu Dermaga Sembulang dan Dermaga Pulau Petong.

3.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan mengemban 3 (tiga) Program 14 (empat belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Berikut disampaikan tabel perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan tahun 2023 sebagaimana yang telah diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri:

TABEL III.3
RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2023
DINAS PRHUBUNGAN KOTA BATAM

Kode	Usuran/Bidang Usuran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah		Target 2023	Pagu Indikatif	
02.15.			URUSAN : PERHUBUNGAN	URUSAN : PERHUBUNGAN				76,687,048,292.00	53,702,408,062.00	55,276,215,797.08								64,814,047,110.00	DISHUB
02.15.01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	31,276,638,368.00	28,198,303,835.00	24,641,053,835.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,494,091,410.00	DISHUB
02.15.01.2.02.			KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	14,107,462,189.00	11,819,112,723.00	11,844,312,723.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			13,409,387,510.00	DISHUB
02.15.01.2.02.01.			SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	73 Orang	13,939,332,189.00	11,675,712,723.00	11,675,712,723.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	73 Orang/bula n	13,243,067,510.00	DISHUB
02.15.01.2.02.03.			SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Tahun	1 Tahun	168,130,000.00	143,400,000.00	168,600,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	32 Dokumen	166,320,000.00	DISHUB
02.15.01.2.05.			KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	133,600,000.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			265,224,000.00	
02.15.01.2.05.02.			SUB KEGIATAN : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	SUB KEGIATAN : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas	Jumlah Paket Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		160 Stel	160 Stel	133,600,000.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	172 Paket	127,036,000.00	
02.15.01.2.05.09.			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	00.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	10 Orang	138,188,000.00	
02.15.01.2.06.			KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	696,226,100.00	375,432,712.00	325,382,712.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			259,861,300.00	DISHUB
02.15.01.2.06.01.			SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Lampu Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Tahun	5 Jenis	27,462,000.00	173,508,500.00	173,508,500.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	1 Paket	8,386,000.00	DISHUB
02.15.01.2.06.02.			SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK dan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Tahun	34 Jenis	123,454,800.00	65,201,712.00	65,201,712.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ASN	5 Paket	83,143,500.00	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah		Target 2023	Pagu Indikatif	
02.15.01.2.06.04	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya BBM Kendaraan Dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Tahun	1 Jenis	303,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	2 Paket	19,100,000.00	DISHUB
02.15.01.2.06.05	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang- Barang Cetakan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		1 Tahun	6 Jenis	34,971,500.00	19,082,500.00	19,082,500.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	1 Paket	24,486,800.00	DISHUB
02.15.01.2.06.09	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya SPPD Untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Tahun	20 Kali	206,737,800.00	111,040,000.00	60,990,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN	38 Laporan	124,765,000.00	DISHUB
02.15.01.2.07.	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	637,760,000.00	333,865,000.00	301,465,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,198,126,400.00	DISHUB
02.15.01.2.07.02	SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	SUB KEGIATAN : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	-	Jumlah Unit Peralatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	00.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	2 Unit	737,480,000.00	
02.15.01.2.07.05	SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebeleur	SUB KEGIATAN : Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	1 Jenis	68,310,000.00	64,800,000.00	32,400,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	22 Unit	103,430,000.00	DISHUB
02.15.01.2.07.06	SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SUB KEGIATAN : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Paket	5 Jenis	49,450,000.00	269,065,000.00	269,065,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	38 Laporan	357,216,400.00	DISHUB
02.15.01.2.07.09	SUB KEGIATAN : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SUB KEGIATAN : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung dan Taman Kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 paket	-	520,000,000.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
02.15.01.2.08.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	3,143,190,235.00	2,594,413,400.00	2,594,413,400.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,717,737,400.00	DISHUB
02.15.01.2.08.02	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Rekening Listrik, Air, Telp dan Internet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Tahun	4 Jenis	1,086,164,075.00	805,695,000.00	805,695,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa	4 Laporan	805,695,000.00	DISHUB
02.15.01.2.08.04	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Gaji dan Tunjangan THL	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Tahun	43 Orang	2,057,026,160.00	1,788,718,400.00	1,788,718,400.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Jasa	12 Laporan	1,912,042,400.00	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah		Target 2023	Pagu Indikatif	
02.15.01.2.09.	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	533,399,844.00	575,480,000.00	575,480,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					685,560,000.00	DISHUB
02.15.01.2.09.02	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Pembayaran Pajak Kendaraan 2. Pemeliharaan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Paket	1. 63 Unit 2. 19 Unit	292,611,060.00	573,080,000,000.00	573,080,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Barang Milk Daerah	6 Unit	631,630,000.00	DISHUB	
02.15.01.2.09.06	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	-	00.00	00.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Barang Milk Daerah	6 Unit	51,530,000.00		
02.15.01.2.09.09	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Paket	6 Jenis	240,788,784.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Barang Milk Daerah	1 Unit	2,400,000.00	DISHUB	
02.15.01.2.10.	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%	90%	90%	12,025,000,000.00	12,500,000,000.00	9,000,000,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8,958,194,800.00	DISHUB
02.15.01.2.10.01	SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	SUB KEGIATAN : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Tahun	4 Koridor	12,025,000,000.00	12,500,000,000.00	9,000,000,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelayanan	1 Unit Kerja	8,958,194,800.00	DISHUB	
02.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	100%	100%	100%	37,065,497,159.00	18,921,929,407.00	24,052,987,142.08	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					29,460,332,150.00	DISHUB
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	5.211 Unit	5.211 Unit	5.211 Unit												
02.15.02.2.01.	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	0	100%	100%	00.00	951,257,900.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					00.00	DISHUB
02.15.02.2.01.01	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-	1 Dokumen	00.00	951,257,900.00	00.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dokumen Perencanaan	-	00.00	DISHUB	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah		Target 2023	Pagu Indikatif	
02.15.02.2.02.	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	Persentase Perengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	10%	10%	4,506,176,450.00	1,556,515,600.00	1,031,632,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4,948,065,500.00	DISHUB
02.15.02.2.02.01	SUB KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Pembangunan Halte 2. Pembangunan Transfer Point	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		1. 10 Unit 2. 1 Unit	1. - 2. - 3. Pedestrian 183 m2 4. Halte 5 Unit	2,330,463,900.00	443,692,600.00	37,881,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perhubungan	4 Unit	891,824,900.00	DISHUB
02.15.02.2.02.02	SUB KEGIATAN : Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Canstin 2. Marka Jalan 3. Papan Nama Jalan 4. Rambu Lalin Standar 5. Pita Penggaduh 6. Rambu Type F 7. RPPJ 8. Zona Selamat Sekolah	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1. 1000 m 2. 1000 m2 3. 100 Unit 4. 100 Unit 5. 160 m2 6. 10 Unit 7. 10 Unit 8. 2 Lokasi	1. 300 m 2. - 3. - 4. 50 Unit 5. - 6. 5 Unit 7. 5 Unit 8. - 9. Guadrail 100 m 10. Rambu Elektronik 5 Unit	1,535,040,300.00	645,025,800.00	525,953,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perhubungan	214 unit dan 7,1 km	3,306,499,600.00	DISHUB
02.15.02.2.02.03	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1. Rehab Halte 2. Rehab JPO	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		1. 30 Unit 2. 2 Unit	1. 1 Unit 2. -	301,630,400.00	174,072,800.00	174,072,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perhubungan	16 Unit	396,070,000.00	DISHUB
02.15.02.2.02.04	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	SUB KEGIATAN : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Rehab Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		70%	1. Papan Nama Jalan 5 Unit 2. Rambu Standart 25 Unit 3. RPPJ 5 Unit	339,041,850.00	293,724,400.00	293,724,400.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perhubungan	125 Unit	353,671,000.00	DISHUB
02.15.02.2.04.	KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	KEGIATAN PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	Persentase Titik Parkir yang yang dikelola	Persentase Titik Parkir yang yang dikelola	100%	84%	84%	1,662,858,600.00	1,445,953,100.00	1,871,250,100.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2,164,093,100.00	DISHUB
02.15.02.2.04.02	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Parkir yang Dikelola	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		668 Titik Lokasi Parkir	598 Titik Lokasi Parkir	1,662,858,600.00	1,445,953,100.00	1,871,250,100.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelayanan Parkir	628 Laporan	2,164,093,100.00	DISHUB
02.15.02.2.05.	KEGIATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	KEGIATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Persentase Operasional Pelayanan PKB	Persentase Operasional Pelayanan PKB	73%	61%	61%	1,353,679,950.00	639,235,000.00	639,235,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					693,239,000.00	DISHUB
02.15.02.2.05.01	SUB KEGIATAN : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sarana dan Prasarana Pengujian yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		100%	16 Jenis	435,861,500.00	49,235,000.00	49,235,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Wajib Uji	11 Unit	51,739,000.00	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah		Target 2023	Pagu Indikatif	
02.15.02.2.05.04	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti Lulus Uji yang Tersedia	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		16000 set	10000 set	460,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Wajib Uji	10000 Dokumen	257,500,000.00	DISHUB
02.15.02.2.05.07	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		1 Tahun	3 Jenis	457,818,450.00	340,000,000.00	340,000,000.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Wajib Uji	3 Unit	384,000,000.00	DISHUB
02.15.02.2.06.	KEGIATAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	100%	63%	63%	11,909,341,165.00	4,093,492,763.00	6,342,786,878.08	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7,606,382,300.00	DISHUB
02.15.02.2.06.02	SUB KEGIATAN : Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	SUB KEGIATAN : Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Pembangunan APILL 2. Pemeliharaan APILL	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		1. 3 Lokasi 2. 40 Lokasi	1. 1 Lokasi 2. 36 Lokasi 3. Marka Jalan 1640 m2 4. Pita Penggadah 180 m2 5. ZoSS 732 m2 6. Reklasi APILL 2 Lokasi 7. Warning Light 2 Unit	11,909,341,165.00	4,093,492,763.00	6,342,786,878.08	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan Prasarana Perhubungan	2 Unit dan 2935 M2	7,606,382,300.00	DISHUB
02.15.02.2.08.	KEGIATAN AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	KEGIATAN AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	100%	100%	100%	174,800,000.00	241,962,834.00	213,462,834.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					264,000,000.00	DISHUB
02.15.02.2.08.04	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas 2. Pelaksanaan Razia Angkutan Orang / Barang	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor		1. 1 Tahun 2. 20 Kali	1. 30 Kali 2. 20 Kali	174,800,000.00	241,962,834.00	213,462,834.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kendaraan Angkutan Umum dan Barang	60 Laporan	264,000,000.00	DISHUB
02.15.02.2.09.	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah KABupaten/Kota	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah KABupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100%	90%		17,458,640,994.00	9,993,512,210.00	13,954,619,530.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13,784,552,250.00	DISHUB
02.15.02.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah KABupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah KABupaten/Kota	1. Pengoperasian Bus Sekolah 2. Pengoperasian TRans Batam	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		1. 1 Tahun 2. 1 Tahun	1. - 2. 3 Koridor	17,458,640,994.00	9,993,512,210.00	13,954,619,530.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelayanan Bus Trans Batam	50 Unit	13,784,552,250.00	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode JMD	Target		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Semula	Menjadi		Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target 2023		Pagu Indikatif		
02.15.03.			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	49%	49%	8,344,912,765.00	6,582,174,820.00	6,582,174,820.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,859,623,550.00	DISHUB	
02.15.03.2.06.			KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100%	20 Pulau	20 Pulau	1,950,766,850.00	1,493,633,800.00	1,493,633,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,706,129,800.00	DISHUB	
02.15.03.2.06.02.			SUB KEGIATAN : Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	SUB KEGIATAN : Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengoperasian Kapal di Wilayah Hinterland	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Tahun	20 Pulau	1,950,766,850.00	1,493,633,800.00	1,493,633,800.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang Merata Berkualitas dan Berkesinambungan di Mainland dan Hinterland	Sarana dan Prasarana Laut	2 Laporan	1,706,129,800.00	DISHUB
02.15.03.2.12.			KEGIATAN Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	KEGIATAN Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	100%	100%	6,394,145,915.00	5,088,541,020.00	5,088,541,020.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,153,493,750.00	DISHUB	
02.15.03.2.12.02.			SUB KEGIATAN : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUB KEGIATAN : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tarlaksananya Pembangunan Dermaga	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		1 Unit	3 Unit	2,300,000,000.00	4,845,651,250.00	4,845,651,250.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Sarana dan Prasarana Laut	3 Unit	4,677,944,750.00	DISHUB
02.15.03.2.12.03.			SUB KEGIATAN : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	SUB KEGIATAN : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bangunan dan Dermaga Yang Terpelihara	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		3 Unit	1 unit	4,094,145,915.00	242,889,770.00	242,889,770.00	Kota Batam	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Sarana dan Prasarana Laut	7 Unit	1,475,549,000.00	DISHUB

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2023 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Batam.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Batam. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Batam, Agustus 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



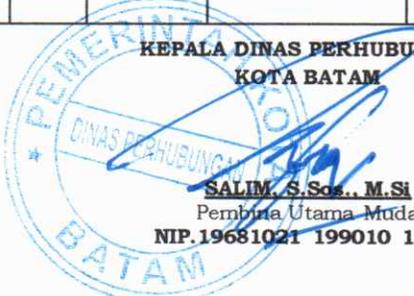
SALIM, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19681021 199010 1 001

Fomulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.				
2.	Pengolahan data dan informasi.	Ada			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPД kabupaten/kota.		Tidak Ada	Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	Tidak Ada
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	Ada			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	Ada			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	Ada			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.		Tidak Ada	Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	Tidak Ada
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		Tidak Ada	Tidak merupakan tahapan dalam Perubahan Renja	Tidak Ada
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	Ada			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	Ada			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	Ada			

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM

SALIM, S.Sc., M.Si
 Pembina Utama Muda
NIP.19681021 199010 1 001



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 3 Telp. (0778) 459503 Fax. (0778) 452826 Kota Batam - 29433

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Nomor : 1359/KU.00.00/XII/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2024
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
- b. bahwa apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023;
 - b. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 5 Desember 2022



LAMPIRAN : SK kepala Dinas Perhubungan
 NOMOR : 1359/HB.00.01/XII/2022
 TANGGAL : 5 Desember 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	KETUA TIM
II.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	SEKRETARIS TIM
III.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS	KETUA POKJAI BIDANG PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
III.1.	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	ANGGOTA
III.2.	KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.3.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.4.	KA. UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	KOORDINATOR
III.5.	KA. TU UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
III.6.	STAF BIDANG LALU LINTAS	ANGGOTA
III.7.	STAF UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
IV.	KEPALA BIDANG LAUT	KETUA POKJAI II BIDANG EVALUASI
IV.1.	KEPALA SEKSI PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN	ANGGOTA
IV.2.	KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN	ANGGOTA
IV.3.	KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
IV.4.	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA
IV.5.	STAF BIDANG LAUT	ANGGOTA
V.	KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN	KETUA POKJAI III BIDANG STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
V.1.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG	ANGGOTA
V.2.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG	ANGGOTA
V.3.	KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGGOTA
V.4.	KEPALA UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.5.	KEPALA TU UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.6.	STAF ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
V.7.	STAF UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
VI.	KEPALA BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	KETUA POKJA IV BIDANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
VI.1.	KEPALA SEKSI PRASARANA ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
VI.2.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS	ANGGOTA
VI.3.	KEPALA SEKSI PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
VI.4.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
VI.5.	KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA
VI.6.	STAF BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	ANGGOTA
VI.7.	STAF SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS



SALIM, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001